

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.

Meuwissen, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori, Hukum dan Filsafat*

*Hukum* Penerjemah : Prof.Dr.B.Arief Sidharta,S.H Penerbit : PT. Refika Aditama, Bandung, Tahun : 2007

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*,

Publisher:Yogyakarta : Liberty, 1996

Hutabarat Roselyne, *Transaksi Ekspor Impor*. Jakarta: Erlangga, 1990.

Nurhasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi*

*Politik*, Kerjasama Huma dan Magister Hukum UGM, Yogyakarta, 2007.

Kementrian Kelautan dan Perikanan, *Buku Rencana Aksi Nasional (RAN)*

*Konservasi Karang*, Direktorat Konservasi Hayati Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementrian Kelautan dan Perikanan 2016.

Moh. Mahfud, MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, Aneka Cipta, Jakarta, 2000,

Kranenburg, R. dan Tk. B. Sabaroedin, *Ilmu Negara Umum*. Cetakan

Kesebelas, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.

Sri Soemantri, M, *Bunga Rarnpai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni,

Bandung, 1992.

Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum*

*Lingkungan Indonesia*, EdisiRevisi Bandung:Alumni, 2014.

- M. Daud Silalahi, S.H, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996
- Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan & Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*, Surakarta:Muhammadiyah University Press, 2000.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 1999.
- Lon L. Fuller, *The Morality of law*, Yale University Press, 1969,  
<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum>.
- Arief Sidharta, *Kepastian Hukum di Indonesia*, Bandung: Penerbit Cahaya, 2006
- Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2006
- BIRD.. E.C.F. 1976. *Coast; An Introduction to Systematic Geomorphology*. Australian National University Press: 219 -243
- CLARK. J.R. 1988. *Program Development for Management of Coastal Resources*. Nat. Park Serv. U.S. Dep. of the Interior and U.S. Agency for Int. Dev.: 13-14.
- Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986.
- M. Rasyid Ariman, *Fungsi Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Alikodra, H.S., *Konservasi Sumber Daya dan Lingkungan Pendekatan Ecosophy Bagi Penyelamatan Bumi* GajahMada University Press. Yogyakarta, 2012.
- Fandeli, C., Muhammad, *Prinsip-prinsip Dasar Mengkonservasi Lansekap*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta, 2009.
- Wibisana, M.R.A.G. *Law and Economic Analysis of the Precautionary* . Desertasi Doktor Maastricht University, Maastricht. 2008.

Freestone, David & Ellen Hey. *Origins and Development of the Precautionary*

*Principle*, dalam *The Precautionary Principle and International Law, The Challenge of Implementation*. Hague: Kluwer LawInternational 1996.

2. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang NO. 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.

27 Tahun 2007 tentang Pengolahan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang No.

31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Undang-undang NO. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya.

Undang-undang No. 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan

3. Keputusan Presiden/ Peraturan Presiden.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang

Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

Keputusan Presiden nomor 103 Tahun 2001 tentang Tugas, Fungsi,

Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

Keputusan Presiden No. 33 Tahun 2002 tanggal 23 Mei 2001

tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut yang merupakan pembentukan Tim Pengendali dan pengawas perusahaan pasir laut.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2007 tentang

Konservasi Sumber Daya Ikan.

4. Keputusan Menteri/ Peraturan Menteri

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 04 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku

Kerusakan Terumbu Karang

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22/PERMEN-KP/2008

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2016

Tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018

Tentang Pemanfaatan Jenis ikan Yang Dilindungi dan/atau Ikan Yang Tercantum Dalam Appensiks Convention On International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITIES).

Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu , dan Keamanan

Hasil Perikanan Nomor 59 / KEP-B KIPM/ 2016 Tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Kesehatan Hasil Perikanan.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor.KM.67/UM.001/ 2004

tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-pilau Kecil  
Keputusan Menteri Kelautan N0. 33 Tahun 2002 Tentang Zonasi Wilayah Pesisir  
dan Laut untuk Kegiatan Pengusahaan Pasir Laut  
Kepala Badan Karantina Ikan Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan  
Nomor. 32 / KEP-BKIPM/ 2015 tentang petunjuk teknis pemantauan hama  
dan penyakit ikan karantina

5. Makalah dan Artikel

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Laporan hasil Penelitian Karang  
Hias Indonesia Tahun 2017*, (03/02/2018).

Asosiasi Koral Kerang dan Ikan Hias Indonesia, Cara pengambilan karang hias  
untuk perdagangan, Tahun 2018

Prof. Dr. Suharsono, peneliti senior Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, *Kondisi  
Teranyar Terumbu Karang di Indonesia*,

Suhana.web.id. *Perdagangan Karang Hias*.8/24/2020

Nusantara Maritim News *Pasar karang hias dunia saat ini 80% diambil alih  
Australia*, Selasa 9 Agustus 2016, 09:30 WIB

Badan Pusat Statistik (BPS) *laporan data ekspor karang hias periode 2015-2017*

Achmad Dwi Afriyadi Tak Bisa Ekspor, *Pengusaha Karang Hias Rugi Rp 100  
Milyar*, detikFinance, Rabu, 17 Okt 2018 11:11 WIB.

Dewan Kelautan Indonesia, *Membangun Laut Membangun Kejayaan Dulu,  
ini dan Masa Depan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi dan  
Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika,

Moh. Mahfud, MD, *Konsepsi dan Implementasi Negara Hukum Kita*, dalam Orasi

Ilmiah, Sidang Senat Terbuka Wisuda VI Sekolah Tinggi Ilmu Hukum 'IBLAM', Jakarta, 2004

1 [http://www.academia.edu/4393175/Menyelamatkan Masa Depan Pulau-Pulau Kecil](http://www.academia.edu/4393175/Menyelamatkan_Masa_Depan_Pulau-Pulau_Kecil), diakses pada tanggal 4 Desember 2020.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, *izin untuk memanfaatkan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil*. 2019.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, “ *Kegiatan dan Pengendalian Ruang Laut*”, 14 November 2019

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Kondisi Terumbu Karang Indonesia, Senin (25/11/2019).

Tribun Bali.com, *Bak Disambar Petir, Joko Kaget Surat Penghentian Ekspor*

*Koral Ke Luar Negeri*, Penulis: I Wayan Erwin Widyaswara Editor: Eviera Paramita Sandi, Rabu, 16 Mei 2018 08:35

Lukita Purnamasari, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Dan*

*Berkelanjutan Yang Berbasis Masyarakat*, 2009. Sumber; <https://uwityangyoyo.wordpress.com>, Diakses tanggal 1 November 2016

Y. Nurmalasari, *Analisis Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis*

*Masyarakat, Makalah Rapat Koordinasi Nasional Departemen Kelautan dan Perikanan*, Bandung; STMIK Indonesia Mandiri, 2002, hlm. 1. Sumber; [www.stmik-am.ac.id/userfiles/jurna%20yessi.pdf](http://www.stmik-am.ac.id/userfiles/jurna%20yessi.pdf), Diakses tanggal 1 November 2016

Neni Nurani, *Pemanfaatan Pengelolaan Wilayah Pesisir*, 2008.

Sumber; [http://rangkuman-materi-kuliah.blogspot.co.id/2012/06/pemanfaatan -pengelolaan-wilayah-pesisir.html](http://rangkuman-materi-kuliah.blogspot.co.id/2012/06/pemanfaatan-pengelolaan-wilayah-pesisir.html) Diakses tanggal 1 November 2016.

Kelompok Kerja Nasional Informasi Geospasial Tematik Pesisir dan Laut,

Program Onemap Policy. <http://coremap.oceanografi.lipi.id/downloads/120107.jpg>

Pusat Penelitian Oseanografi – *Status Terumbu Karang Indonesia 2017*



Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Penulis: Giyanto, Muhammad Abrar, Tri Aryono Hadi, Agus Budiyanto, Muhammad Hafizt, Abdullah Salatalohy, Marindah Yulia Iswari.

Balitbang Oseanografi, Puslitbang Oseanologi – LIPI, *Elemen Utama Terumbu Karang* Jakarta. sumber: [www.oseanografi.lipi.go.id](http://www.oseanografi.lipi.go.id) Oseana, Volume XXIII no. 3 & 4, 1998

Sudiarta, I K. 2002. *Status dan Profil Terumbu Karang di Wilayah Pesisir*

*Bali. Lokakarya; Pembuatan Zonasi Wilayah Pesisir dan Lautan Bali Selatan.* Bappedalda. Bali Denpasar